

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur, maka dapat disimpulkan beberapa hal baik secara umum maupun secara khusus.

1. Simpulan Umum

Nilai kearifan lokal merupakan salah satu aspek yang harus menjelma dan dilakukan dalam setiap aktivitas manusia, termasuk di dalamnya sebagai arah, orientasi, dan paradigma pembangunan di era otonomi daerah. Pembangunan berbasis nilai kearifan lokal menjadi trend positif dalam upaya mempercepat terlaksananya pembangunan, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Keunggulan nilai kearifan lokal sebagai landas pijak pembangunan terletak dari makna yang terkandung di dalam nilai dimaksud.

Nilai *sauyunan* yang hidup dan berkembang pada masyarakat Sunda menyiratkan bahwa dalam pembangunan perlu ada kebersamaan dan kolaborasi kekuatan antarelemen pembangunan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat) yang berjalan secara sistematis dan sinambung. Selain itu, pelaksanaan pembangunan harus mampu mengimplementasikan pepatah *silih asah, silih asuh, silih asih* dan *cing caringcing pageuh kancing, set saringset pageuh iket* dalam arti bahwa pembangunan harus merupakan kolaborasi antara cinta dan kasih sayang serta tidak lepas dari dukungan pola pikir yang mumpuni dan terarah pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Nilai lain yang tak kalah pentingnya untuk dikembangkan dalam pembangunan adalah religiusitas yang mempertegas bahwa Indonesia bukan sebagai negara sekuler, nilai kerelaan yang menyiratkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak harus dilaksanakan secara sukarela demi terwujudnya kemandirian bangsa, dan pepatah “hade goreng ku basa” menyiratkan bahwa komunikasi menjadi aspek pendukung kelancaran pembangunan, karena tanpa komunikasi dan koordinasi adalah tidak mungkin tercipta pembangunan yang maksimal.

2. Simpulan Khusus

Secara khusus penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang dikaji, sebagai berikut:

Pertama, implementasi pembangunan daerah berbasis nilai kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta menggunakan filosofi persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara dan matahari yang secara terintegrasi sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada *kemanunggalan*, *keparipurnaan* dan kemuliaan dan senantiasa didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan YME. Pembangunan di Kabupaten Purwakarta dilakukan atas dasar kecintaan dan penghargaannya terhadap lingkungan dan alam tempat hidup manusia yang dimanifestasikan dalam wujud pembangunan infrastruktur (tata ruang kota) dan suprastruktur (pemberdayaan masyarakat)

Kedua, relevansi nilai kearifan lokal dalam kaitannya dengan pembangunan daerah kekuatan utama terletak dari prinsip "*sauyunan*" sebagai jatidiri dan karakteristik masyarakat Sunda, disertai dengan penerapan konsepsi *silih asah*, *silih asuh*, *silih asih*, serta mengkolaborasikan antara kekuatan pikiran, badan, dan batin sebagaimana tercermin dalam pepatah Sunda "*cing caringcing pageuh kancing*" dan "*set saringset pageuh iket*". Untuk menciptakan hal tersebut, maka pemerintah dalam aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dalam *good governance*, meliputi; transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kesesuaian dengan lingkungan masyarakat.

Ketiga, tantangan yang muncul dalam menempatkan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditengah terpaan globalisasi, meliputi; perbedaan cara berpikir antarelemen (pemerintah maupun masyarakat) terhadap orientasi pembangunan, masih banyaknya anggapan bahwa pembangunan berwawasan lokal merupakan suatu kemunduran demokrasi, kedaerahan, dan cenderung tradisional (kuno). Selain itu, masalah yang muncul dalam praksisnya adalah terdapat satu unsur yang terlewatkan oleh pemerintah kaitannya dengan pembangunan, yakni karakteristik masyarakat religius (muslim) yang ada pada masyarakat Purwakarta. Selain itu, masih

minimnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan pembangunan turut serta terhambatnya proses pembangunan.

Keempat, model pembangunan daerah berbasis kearifan lokal harus mampu mensinergiskan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Sinergitas tersebut harus berangkat dari sejumlah nilai yang mencirikan karakteristik masyarakat Sunda, meliputi; religiusitas, kerelaan, kemuliaan, komunikasi sosial, interaksi sosial, menyadari lingkungan sebagai sumber kehidupan. Kesemua nilai tersebut hanya dapat tercipta apabila prinsip “*sauyunan*” dijadikan dasar dalam bergerak.

B. Implikasi

Berdasarkan kajian pustaka, temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka penelitian mempunyai sejumlah implikasi sebagai berikut:

1. Penguatan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) selama ini belum banyak dikaji, karena itu hasil penelitian semakin memperkuat posisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu terintegrasi dan multidimensional.
2. Penelitian ini semakin mempertegas perlunya penguatan konsep “*sauyunan*” dalam kehidupan sehari-hari sebagai kekuatan utama penggerak pembangunan yang selain memperkuat nilai lokal juga memperkuat jatidiri bangsa Indonesia, yaitu gotong-royong.
3. Hasil penelitian semakin mempertegas perlunya sinergitas *triple helix* yakni pelibatan unsur masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan, dalam hal ini pembangunan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat.

C. Rekomendasi

Untuk menutup hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa hal yang setidaknya dapat dijadikan rekomendasi dalam melaksanakan pembangunan berbasis kearifan lokal.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
 - a. Bagi lembaga legislatif, prinsip “*sauyunan*” mempunyai makna yang mendalam karena itu perlu dikembangkan dan diinternalisasikan dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, dalam pembahasan berbagai rencana kebijakan pembangunan harus mampu mengesampingkan kepentingan partai, melainkan harus mengedepankan kepentingan bersama atas nama masyarakat.

- b. Bagi lembaga eksekutif, perlunya visualisasi nilai kearifan lokal dalam bentuk tindakan pemerintah, karena masyarakat akan lebih menerima dan memahami substansi nilai kearifan lokal apabila melihat pemerintahnya mampu merealisasikannya dalam kehidupan (keteladanan). Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kegiatan advokasi dan komunikasi dengan masyarakat dan swasta untuk menumbuhkan komitmen bersama serta membangun kesepahaman mengenai orientasi pembangunan di Kabupaten Purwakarta
 - c. Bagi lembaga yudikatif, korupsi, kolusi dan nepotisme masih besar berpeluang besar terjadi dalam praksis pembangunan, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih intensif terutama dalam penggunaan APBD agar dapat tercapai apa yang menjadi target pembangunan.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Purwakarta
 - a. Bagi masyarakat umum, hendaknya harus lebih responsif terhadap setiap program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selain itu, peningkatan pemahaman, pemaknaan dan pembiasaan nilai kearifan lokal harus terus dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Bagi tokoh pemuda, pembangunan memerlukan kekuatan dan pemikiran kreatif generasi muda, karena itu para tokoh pemuda harus lebih responsif terhadap setiap aktivitas pembangunan yang dilaksanakan.
 - c. Bagi tokoh desa, pelestarian akan tradisi dan nilai kearifan lokal Sunda perlu dilakukan terlebih di era globalisasi seperti sekarang, sehingga jati diri orang Sunda tidak hilang tergeser oleh nilai global.
 3. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
 - a. Departemen pendidikan kewarganegaraan hendaknya lebih dalam mengkaji dan mengembangkan berbagai dimensi dalam kaitannya dengan kewarganegaraan Indonesia yang pada hakikatnya tidak dapat lepas dari

akar budaya lokalnya, sehingga pendidikan kewarganegaraan yang ada menunjukkan corak ke-Indonesiaannya.

- b. Mata kuliah pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan penelitian ini adalah kebijakan publik dan sistem pemerintahan daerah, karena itu melalui mata kuliah ini mahasiswa harus didorong untuk melakukan pengkajian akan nilai-nilai lokal yang ada di setiap daerah sebagai basis tata kelola pemerintahan di era otonomi daerah.
 - c. Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu aspek yang harus dilaksanakan sebagai wujud tridarma perguruan tinggi. Kaitan dengan itu, maka dapat dilakukan suatu format P2M yang mengarah pada pengembangan proyek pembangunan misalnya dengan melakukan kegiatan dialog interaktif yang memfasilitasi pertemuan tiga pilar pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam satu meja untuk membicarakan persoalan dan prospek pembangunan daerah.
 - d. Untuk bidang penelitian, dapat dikembangkan penelitian-penelitian dalam upaya mendukung pembangunan dari sisi pemikiran, misalnya dengan melakukan penelitian tentang kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana perguruan tinggi telah memberikan pemikirannya terhadap pembangunan riil di masyarakat (bukan hanya konsep semata).
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi model penguatan kearifan lokal dalam pembangunan daerah, karena peneliti menyadari hasil yang diharapkan masih jauh dari sempurna. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan untuk mengkaji salah satu nilai yang ada pada masyarakat Sunda, yakni “*ngajago*”. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai itu memang harus ada, dikembangkan, dan relevan dengan kehidupan masyarakat Sunda ataukah justru harus dihilangkan.